

DEMOKRASI DALAM RUANG SIBER SEBAGAI TATANAN DUNIA BARU

Oleh: Paulus Berekama Tukan
(Mahasiswa Semester V STFK Ledalero)

Abstraksi: *Praktik berdemokrasi dalam ruang siber yang dijalankan dewasa ini menampakkan persoalan dilematis. Pandemi Covid-19 memantik keterlibatan intens warga negara dalam ruang siber seperti media sosial yang tidak saja mempermudah warga negara berpartisipasi secara demokratis tetapi juga menimbulkan sejumlah persoalan pelik dalam kehidupan berwarga negara. Metode yang dipakai penulis ialah kajian analisis-kritis. Penulis pertama-tama menguraikan letak persoalan dilematis praktek berdemokrasi dimaksud dalam ruang siber. Selanjutnya, penulis akan menguraikan konsep ruang siber dan cara kerja di baliknya. Tesis dasar bahasan ini ialah demokrasi dalam ruang siber sebagai sebuah tatanan dunia baru. Uraian selanjutnya akan berkonsentrasi pada upaya mempertimbangkan ruang publik dalam ruang siber sebagai arena demokrasi. Kajian ini diakhiri dengan pembahasan tentang demokrasi sebagai sebuah sistem bernegara dalam ruang siber.*

Kata-kata kunci: *Demokrasi, ruang siber, tatanan dunia baru, ruang publik*

I. PENDAHULUAN

Sejak kemunculan pandemi Covid-19, akses terhadap media digital menjadi sedemikian penting dalam hampir seluruh tatanan kehidupan. Realitas virtual (*virtual reality*) menggeser konsentrasi manusia akan realitas fisik yang memungkinkan perjumpaan ‘tatap muka’. Marc Prensky benar ketika mendeskripsikan situasi pasca abad -21 sebagai sebuah dunia yang berisi orang-orang yang fasih berjaringan (*net savvy*).¹ Menurut saya, Prensky sebenarnya menyentak kesadaran manusia akan keterampilan berjejaring apalagi di masa pandemi Covid-19 ini.

Maraknya akses terhadap media digital itu menimbulkan perubahan paradigmatik dalam kehidupan bernegara khususnya praktek berdemokrasi. Ruang publik bergeser dalam suatu *platform* yang baru yaitu media dalam jaringan. Seluruh diskursus publik justru diciptakan dalam ruang siber ini. Namun, diskursus publik sebagai roh demokrasi itu kerap dihadapkan pada persoalan dilematis: kebebasan mengekspresikan pikiran tanpa represi sebagai bentuk partisipasi demokratis di satu sisi dan kebebasan ekspresi yang melampaui tatanan etis-normatif bahkan pada tahap sangat ekstrim norma-norma etis-normatif itu kerap direlativisasi, di sisi lain.

Di Indonesia, ekspresi berdemokrasi dalam ruang siber menjadi persoalan urgen. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dalam akun *instagram @bemui_official* pada 26 Juni 2021 misalnya, memuat sebuah meme bergambar presiden Jokowi mengenakan mahkota dan diberi teks, “Jokowi: The King of Lip Service”. Meme ini merupakan sebuah kritik atas kinerja Jokowi karena terdapat jurang lebar antara apa yang diucapkannya dan realitas yang sebenarnya, seperti janji penguatan KPK, kerinduan untuk didemo dan keinginan untuk merevisi UU ITE.²

Kritik ini menuai kontroversi. Bagi pihak pro, BEM UI dinilai telah menjalankan peran intelektual secara konkret ketika mengontrol kinerja kekuasaan. Karena itu, kritik dianggap sebuah kewajiban intelektual.

-
- 1 Marianus Mantovani Tapung, “Penetrasi Digital yang Masif di Manggarai” dalam *Pos Kupang*, Jumat 5 Oktober 2018.
 - 2 Aryo Sumbogo, “BEM UI Kritik Pedas Jokowi, Istana Beri Respons”, dalam *kompas.tv* 27 Juni 2021, <https://www.kompas.tv/article/187608/bem-ui-kritik-pedas-jokowi-istana-beri-respons>, diakses pada 12 Oktober 2021.

Namun, bagi pihak kontra, BEM UI tidak menghargai koridor hukum untuk menyalurkan kritik. Penggunaan media sosial dengan meme bergambar nyentrik itu dinilai menghina presiden dan menghina simbol negara.

Sepengamatan penulis, tempat demokrasi diekspresikan menjadi kian luas. Ruang siber (*cyberspace*) menjadi arena di mana praktik demokrasi dipertontonkan. Persis, pada titik ini kerentanan demokrasi makin mudah dijumpai. Ada dilema etis sekaligus dilema prosedural ketika sebuah diskursus publik ditangguhkan karena kebebasan yang eksklusif, dengannya semua tatanan formal dijungkirbalikan. Dilema prosedural berkaitan dengan bagaimana sebuah diskursus terjadi secara emansipatif dalam ruang siber. Dilema etis menyangkut hospitalitas subjek dalam mengekspresikan kebebasan demokrasinya. Di sini, pertanyaan paling mendasar ialah apakah mungkin ruang siber dijadikan ruang publik? Apakah demokrasi bisa efektif dalam ruang siber yang akhir-akhir ini justru menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia?

II. RUANG SIBER SEBAGAI TATANAN DUNIA BARU

Istilah yang paling sering digunakan untuk mendeskripsikan cara kerja teknologi dalam merancang dan memanipulasi data berbasis komputer ialah Teknologi Informasi (IT)³. Komunitas maya atau ruang siber lahir dari basis kerja internet (*Interconnection Networking*) yang memungkinkan orang menonton dunia yang ditampilkan serentak masuk, menghuni, dan bertindak di dalamnya.⁴

Dasar penerapan IT adalah koneksi antara dua komputer atau lebih yang memungkinkan adanya interaksi komunikasi. Oleh karena itu, ruang siber dapat dipahami sebagai ruang yang dihuni para pelaku dunia maya yang melakukan komunikasi secara elektronik.⁵ Internet sebagai basis kerja dari hunian itu memberikan kombinasi kemudahan

3 Karlina Supeli, "Ruang Publik Dunia Maya" dalam F. Budi Hardiman (ed.), *Ruang Publik Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai cyberspace* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 335.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*, hlm. 337.

yang dibayangkan dalam beragam kegunaan sekaligus; mesin pencari, bioskop, perpustakaan, koran, pasar, bank, galeri, dll.

Ruang siber menampilkan karakteristik yang khas yakni ia merepresentasikan dunia fisis. Ia menampilkan sesuatu yang aktual tetapi aktulitas itu menjadi sesuatu yang tak berhingga. Karena itu, sebutan untuk ruang siber ialah realitas virtual. Namun, hal ini menimbulkan sebuah paradoks; kemayaan itu melibatkan orang-orang sungguhan atau dengan kata lain dunia dengan sebuah kemayaan yang nyata. Hemat penulis, kemayaan di sini adalah suatu cara baru manusia berada dalam dunia karena piranti teknologi dewasa ini memainkan peran sentral dalam seluruh aspek kehidupan. Ruang siber, dalam caranya yang paling ekstrim, mengajak manusia untuk mempersepsikan dunianya secara maya. Namun, basis kerja kemayaan itu selalu berlandaskan pada interaksi simbolis intersubjektif yang dirancang seturut pengalaman empiris manusia. Karena itu, ruang siber dikatakan sebagai tatanan dunia baru. Melaluinya, seluruh tatanan fisik diabstraksikan dan didesain dalam suatu ruang maya.

Ruang siber sebagai tatanan dunia baru menampilkan dua tendensi kerja sistemik yaitu kurasi algoritmis dan polarisasi sosial. Tatanan dunia baru ini melepas kelaziman yang biasanya terjadi dalam dunia riil dengan akses fisik. Algoritma kurasi ialah sistem kerja mesin cerdas yang menyusun dan mengolah dan memanipulasi data agar struktur informasi lebih tertata dan terkelompokkan.⁶ Algoritma kurasi dioperasikan dengan mesin cerdas (*artificial intelligence*) untuk mendesain suatu produk layanan daring yang sesuai dengan keinginan netizen.

Artificial Intelligence (AI) adalah suatu sistem kerja teknologi terbesar dalam hidup manusia yang dalam bentuk paling dasar menggantikan cara kerja manusia dalam menerapkan aturan kalkulasi pada data, mengambil keputusan dan kemudian memperkirakan hasil.⁷ Dalam operasi AI terdapat sistem *machine learning* yang mengidentifikasi wajah manusia

6 Agus Sudibyo, *Tarung Digital Propaganda Komputasional di Berbagai Negara* (Jakarta: KPG, 2021), hlm. 268.

7 Bernard Marr dan Matt Ward, *Artificial Intelligence In Practice* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), hlm. 4.

dari ribuan gambar. Sistem ini kemudian mempelajarinya dalam *deep learning* untuk secara spesifik memberi tanda dan mereproduksi teks tertulis untuk kemudian bisa diakses secara spontan. Pengolahan ini disebut dengan *natural language processing*.⁸

Namun, tatanan baru ruang siber dengan dua karakteristik di atas menimbulkan dilema. Kurasi algoritma di satu sisi menyelamatkan manusia dari rimba informasi yang bersileweran dalam ruang siber, tetapi di sisi lain menjerumuskan pengguna internet dalam eksklusivisme percakapan.⁹ Dalam konteks politik, fragmentasi sosial akan rentan terjadi.

Keadaan seperti ini mengarah pada fragmentasi sosial yang serius terkait isu-isu politik dan keagamaan. Dalam beberapa kasus, ia bahkan memicu tindakan ekstrem yang membahayakan keselamatan bersama. Ketika masyarakat berkembang dalam faksi-faksi yang tidak mampu berkomunikasi dan memahami satu sama lain, lembaga dan prinsip demokrasi pun mengalami pelemahan. Sebab, demokrasi pada dasarnya membutuhkan dialog yang terbuka konstruktif dan seimbang di antara berbagai faksi dalam masyarakat.¹⁰

Sebagai tatanan dunia baru, ruang siber pada dasarnya menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam praktek demokrasi. Masyarakat kita dewasa ini adalah masyarakat siber yang tidak menyadari kerja algoritma. Algoritma telah menentukan informasi mana yang akan ditunjukkan di balik tampilan *newseed* facebook misalnya berdasarkan penelusuran dan hubungan, jaringan sosial dan aktivitas digitalnya. Pada titik inilah, kerentanan berdemokrasi akan sangat potensial karena sistem kerja internet membaca secara intensif seluruh jejak digital pengguna dan menawarkan banyak manipulasi.

8 Agus Sudibyo, *loc. cit.*

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*, hlm. 269.

III. MEMPERTIMBANGKAN RUANG SIBER SEBAGAI RUANG PUBLIK

Pertanyaan mendasar sejak kemunculan teknologi yang membuka ruang siber ialah apakah ruang siber itu dapat membangun suatu ruang publik yang dapat dijadikan ruang diskusi kepentingan umum tentang keprihatinan warga dunia nyata? Untuk memahami hal ini perlu diuraikan premis-premis dasar konsep ruang publik.¹¹

Konsep pertama, ruang publik diartikan lebih dekat dengan konsepsi geografis-arsitektural dalam tata ekonomi-politik modern. Konsep ini digagas oleh Henri Lefebvre seorang pemikir geografi dan arsitektur. Pandangan ini menggagas ruang publik dalam konteks ruang sosial untuk menyangga interaksi antara kota besar dan ekonomi global.

Kedua, ruang publik sebagai sebuah ruang yang terbentuk karena gagalnya sistem pasar bebas yang menimbulkan pengalihan tanggung jawab dan wewenang kepada pemerintah untuk pengadaan hal-hal umum dimaksud. Misalnya, bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dll. Pihak swasta sama sekali tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab. Paham ini dianut oleh para ekonom *mainstream*.

Ketiga, ruang publik dalam konteks refleksi budaya. Paham ini mengacu pada kumpulan keyakinan, pandangan, dan praktik sebagai cara orang merasa kolektif dan berlangsung dalam interaksi sosial. Ruang publik ini berkaitan dengan selera publik secara kultural yang dipersatukan oleh refleksi budaya yang sama dan menghasilkan tatanan sosial yang kondusif.

Keempat, ruang publik diartikan dalam konteks filsafat politik sebagai ruang tanpa represi yang menciptakan kolektivitas. Konsep ini lebih sering diasosiasikan dengan konsep Habermas tentang ruang publik. Menurut Habermas, ruang publik menjadi tempat warga negara menyatakan pendapat, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan secara diskursif.¹² Ruang publik dalam konteks politik ini akan mempengaruhi

11 B. Herry-Priyono, "Menyelamatkan Ruang Publik", dalam F. Budi Hardiman (ed.), *Ruang Publik Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 372-375.

12 F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik*

seluruh tatanan kolektif masyarakat karena ia menyiapkan prosedur komunikasi yang emansipatif. Karena itu, ruang publik politis ini menjadi tempat warga negara menjalankan diskursus-diskursus informal dalam semangat inklusivitas dan dapat mempersoalkan segala tema yang relevan.¹³

Dalam definisi terakhir di atas, ruang publik sebagai basis arena demokrasi mendapat pendasaran konseptual yang kokoh. Jika, ruang siber dikonfrontasikan dengan ruang publik dalam arti sebenarnya maka, basis ruang siber mesti menjadi tempat terjadinya diskursus yang *fair*. Persoalannya ialah ruang siber justru tidak menjamin secara menyeluruh apakah ruang publik berlangsung dengan pertimbangan yang terarah kepada kolektivitas. Ruang siber juga bisa menjadi arena sangat privat, tempat orang secara berkala menunjukkan citra dirinya tanpa intensi menjalin diskursus publik. Klaim individual juga mencuat ke ruang sangat publik itu dengan aneka postingan yang bersifat pribadi.

Selain itu, fragmentasi sosial menjadi sebuah persoalan yang rentan. *Locus publicus* dalam ruang siber “dipenggal” oleh dua kondisi ini.¹⁴ *Pertama*, ruang publik digunakan sebagai arena komersial (*commercial domain*). Persoalan mendasar dari ruang siber ialah penggunaannya yang tanpa henti. Yang tampak di dalam ruang siber ialah proses yang selalu bergerak dalam logika kalkulatif untuk menampung jejak digital, merekam dan mendesainnya kembali. Karena itu, pembentukan watak sosial dalam ruang siber ditentukan pertama-tama bukan oleh pertanyaan seputar kewargaan (*citizenship*) melainkan persoalan di seputar konsumen (*consumership*). Di sini, terjadi semacam evolusi watak kultural yang dibentuk oleh sistem komodifikasi yang terpusat pada satu sistem. Sistem digitalisasi saat ini bisa menggiring psikologi massa untuk terlibat dalam persoalan tertentu. Pembentukan watak publik dapat diupayakan dengan logika komodifikasi yang selalu terselip kepentingan-kepentingan ekonomis-parsial. B. Herry-Priyono menulis:

oleh karena itu, kinerja dan arah ruang publik ke depan juga
kian tergantung pada sejauh mana ia mendatangkan laba

dalam *Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 133.

13 *Ibid.*

14 B. Herry-Priyono, *op. cit.*, hlm. 382-383

(*profitable*), dapat diajakan (*saleable*), dan dapat diperjualbelikan (*marketable*). Seluruh cita-cita keberadaan publik (*public civility*) yang merupakan *raison d'être* ruang publik tentu saja pada akhirnya menjadi fatamorgana.¹⁵

Kondisi inilah yang menimbulkan fragmentasi sosial karena perjuangan individual dan hasrat kapitalistik merongrong masuk dalam seluruh tingkah pelaku ruang siber dan para pengendalinya.

Kedua, peluang kinerja pasar bebas. Jika konsep ruang publik adalah ruang tempat kebebasan individual diekspresikan tanpa represi maka ruang siber tak cukup menjamin bahwa represi dihindari secara total. Keterlibatan di dalam ruang siber sudah merupakan keterlibatan sebagai pelaku ekonomis, sumber pengendali mesin siber melacak dan mendesain kronologi keterlibatan para pengguna untuk selanjutnya. Di sini, logika pasar bebas juga dipakai dengan cara yang halus. Karena itu, “mulai jelas hubungan antara ‘pingsannya’ ruang publik dan corak ekonomi-politik fundamentalisme pasar yang dominan dewasa ini.”¹⁶

IV. DEMOKRASI DALAM RUANG SIBER

Sistem demokrasi memang dianggap sebagai primadona tatanan politik. Alasannya, demokrasi membuka ruang kebebasan individual, ada prinsip partisipasi warga, bekerja atas prinsip persaingan rasional dan mengedepankan cara-cara efisien, serta transparan dan fleksibel dalam pemecahan masalah-masalah sosial.¹⁷ Pengalaman getir akibat rezim totaliter abad ke-20 memperkuat asumsi bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik.

Namun, di tengah perkembangan teknologi terutama adanya ruang siber dalam media-media sosial, praktek demokrasi sering menimbulkan paradoks. Dalam momentum tertentu, teknologi internet dapat menjadi sarana mewujudkan demokrasi yang lebih baik karena dengannya,

15 *Ibid.*, hlm. 383.

16 *Ibid.*

17 Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik, Negara dalam Bentangan Diskursus* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2013), hlm. 101.

partisipasi warga negara kian meningkat. Melaluinya, semua kelas sosial dapat terlibat dalam mendiskusikan kepentingan umum. Selain itu, yang terjadi di negara-negara lain ialah pemanfaatan media sosial untuk menumbangkan rezim otoriter dan untuk mengontrol penyelenggaraan kekuasaan.¹⁸ Namun, pada saat yang sama, paparan ruang siber terutama media sosial, memperkuat apa yang disebut ekstremisme digital dan polarisasi masyarakat.¹⁹ Kita dapat melihat paparan terhadap keberagaman informasi cenderung menyeret para pengguna aktif media sosial pada eksklusivisme, yang dalam banyak kasus menjalar ke dalam ranah publik yang nyata. Kasus-kasus intoleran dan ekstrem kerap menjamur ke ruang pengadilan karena paparan media sosial yang membuat orang tak mampu lagi bersikap kritis dan justru sebaliknya doyan terhadap sikap-sikap ekstrem tanpa pengendalian.

Persis, dari persoalan di atas, sebuah afirmasi terdahulu bahwa kelemahan demokrasi ialah opini publik dan formasi kehendak politis gampang dipengaruhi oleh manipulasi, disinformasi dan propaganda, dapat terbukti.²⁰ Karena itu, sebuah salib demokrasi sebenarnya ialah bahwa pengakuan akan kekuatan politis untuk semua sekaligus merupakan pengakuan bahwa keputusan-keputusan yang diterima orang adalah keputusan yang rapuh. “*Crux* atau salib demokrasi dapat dirumuskan sekian: jika orang mengakui praktik kekuasaan politis untuk semua, maka ia juga harus menerima keputusan-keputusannya yang rapuh.”²¹

Namun, ada juga pandangan bahwa media sosial adalah sesuatu yang netral. Joshua A. Tucker menegaskan bahwa ruang siber, dalam hal ini media social, menjadi arena pertarungan bagi aktor prodemokrasi maupun antidemokrasi untuk memperebutkan pengaruh.²² Di sini, sebagaimana ruang nyata, ruang siber sama sekali tidak semata-mata membawa celaka bagi demokrasi.

18 Agus Sudibyo, *op. cit.*, hlm. 304.

19 *Ibid.*, hlm. 303.

20 Otto Gusti Madung, *op. cit.*, hlm. 102.

21 *Ibid.*

22 Agus Sudibyo, *op. cit.*, hlm. 303.

Karena itu, sikap deterministik terhadap teknologi terutama terhadap media sosial sebagai ruang siber adalah sebuah tanda kemerosotan demokrasi. Memang, di satu sisi media sosial menjadi tempat terciptanya hak politik yang sama bagi semua orang untuk menilai penyelenggaraan kekuasaan yang tentu sulit kita temukan dalam media massa, tetapi media sosial juga kerap menciptakan “mayoritas diam” (*silent majority*).²³ Kelompok ini menjadi semacam ‘antitesis’ terhadap model interaksi media sosial yaitu kecenderungan untuk bergerak ke arah yang konfliktual dan anarkistis. Model interaksi itu kerap menonjolkan kebohongan dan ujaran kebencian.

Sikap deterministik terhadap teknologi internet mampu mempengaruhi perkembangan sekaligus kemerosotan demokrasi. Karena itu, demokrasi dalam media siber pertama-tama mesti disadari sebagai sarana di mana keterlibatan semua pengguna di dalamnya tidak serta merta merupakan keterlibatan yang otonom. Sebagai sarana, teknologi internet memiliki logika kalkulasi tersendiri dengan basis ekonomis oleh sejumlah besar orang. Demokrasi dalam ruang siber adalah sebuah demokrasi yang rentan. Di dalamnya, semua warga negara mesti terlibat secara sadar sambil mengakomodasi kepentingan parsial demi kepentingan umum.

V. PENUTUP

Adanya ruang siber menjadi tantangan sekaligus peluang bagi terciptanya demokrasi yang sehat. Ruang siber tak dapat disangkal telah menjadi sebuah tatanan dunia baru pasca pandemi Covid-19 menerpa dunia. Hampir dalam setiap sendi kehidupan, ruang siber berperan penting. Demokrasi pada prinsipnya merupakan upaya emansipatif dalam memperjuangkan hak-hak dasar warga negara. Ruang siber sesungguhnya memungkinkan terciptanya demokrasi yang sehat tetapi praktek demokrasi dalam ruang siber mesti tidak menciptakan sikap determinisme teknologi yang seolah-olah menganggap demokrasi hanya dapat dijalankan dalam ruang siber. Sebagai tatanan dunia baru,

23 *Ibid.*

demokrasi dalam ruang siber menuntut sikap kritis-diskursif untuk membedah setiap persoalan bersama dalam kehidupan berwarga negara. Sikap itu adalah sikap terbuka dan partisipatif untuk mengontrol kekuasaan dan setiap kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta:Penerbit Kanisius, 2009.
- Herry-Priyono, B. “Menyelamatkan Ruang Publik”, dalam F. Budi Hardiman, ed. *Ruang Publik Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik, Negara dalam Bentangan Diskursus*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Sudibyo, Agus. *Tarung Digital Propaganda Komputasional di Berbagai Negara*. Jakarta: KPG, 2021.
- Sumbogo, Aryo. “BEM UI Kritik Pedas Jokowi, Istana Beri Respons”. *kompas.tv* 27 Juni 2021 <<https://www.kompas.tv/article/187608/bem-ui-kritik-pedas-jokowi-istana-beri-respons>>, diakses pada 12 Oktober 2021.
- Supeli, Karlina. “Ruang Publik Dunia Maya” dalam F. Budi Hardiman, ed. *Ruang Publik Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Tapung, Marianus Mantovani. “Penetrasi Digital yang Masif di Manggarai”. *Pos Kupang* Jumat 5 Oktober 2018
- Ward, Matt dan Bernard Marr. *Artificial Intelligence In Practice*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2021.